

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa kami yakin yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di rencanakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terimakasih kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, dan fasilitator kecamatan yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJM Desa, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPJM Desa yang akan datang.

**Tim Penyusun RPJM  
Desa Padang Cakur**

## DAFTAR ISI

### BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Pengertian

### BAB II. PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
  - 2.1.1 Sejarah Desa
  - 2.1.2 Demografi
  - 2.1.3 Keadaan Sosial
  - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

### BAB III.POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah

### BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1 Visi dan Misi
  - 4.1.1 Visi
  - 4.1.2 Misi
- 4.2 Kebijakan Pembangunan
  - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 4.2.2 Potensi dan Masalah
  - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
  - 4.2.4 Strategi Pencapaian

### BAB V. PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

### LAMPIRAN :

1. Sketsa Desa Padang Cakur
2. Tabel Masalah, Penyebab dan Tindakan pemecahan masalah
3. Tabel Kegiatan Swadaya dan dana yang sudah ada tugas pembantuan
4. Tabel Penentuan Peringkat Masalah
5. Tabel Rencana Kegiatan di Desa Padang Cakur
6. Rancangan RPJM Desa Tahun 2014 s.d. 2019

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 43 tahun 2014). Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan desa perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Mengikutsertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di desa. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa tersaji dalam dokumen RPJMDes ini. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kota , Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, kecamatan dan Kota serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan disusunnya RPJMDesa ini adalah:

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015).
2. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
3. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
4. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.

## **1.3 Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 07 Tahun 2007 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2015.
13. Peraturan walikota Pariaman Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2015.
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor ..... Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa.

#### **1.4 Pengertian**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II PROFIL DESA

### 2.1 KONDISI DESA

Desa Padang Cakur merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Secara administratif, wilayah Desa Padang Cakur memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas Dengan Desa Marabau

Sebelah Selatan : Berbatas Dengan Desa Marunggi

Sebelah Timur : Berbatas Dengan Desa Palak Aneh

Sebelah Barat : berbatas Dengan Desa Taluk

Luas wilayah Desa Padang Cakur adalah 78 Ha (7,8 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 30% berupa pemukiman, 60% berupa daratan dan Sawah yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 10% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Padang Cakur mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan. Jarak pusat desa dengan ibu kota kurang lebih 3 km.

#### 2.1.1 Sejarah Desa

Desa Padang Cakur merupakan desa yang terletak pada wilayah paling Selatan dari Kecamatan Pariaman Selatan yang berubah nama dari Nagari Kurai Taji 1980-an. Di desa ini dahulu ada sejenis Tanaman Kencur yang disebut Cakua (bahasa local) yang banyak berada di hamparan/padang di ujung Selatan desa dan tidak ada di wilayah desa sekitarnya.

Bertambahnya dan berkembangnya populasi penduduk yang melakukan pembukaan lahan untuk pemukiman, pertanian dan perdagangan maka mulailah Tanam ini berkurang. Berkemungkinan Tanaman tersebut mulai habis.

#### 2.1.2 Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Padang Cakur adalah 461 jiwa dengan komposisi tersaji dalam.

tabel berikut :Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Padang Cakur

No	Dusun	KK	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Hilir	51	118	120	238
2	Dusun Tarantang	52	120	103	223
	Total	103	238	223	461



Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur

Klp. Umur (Thn)	Dusun Hilir			Dusun Tarantang			Jumlah		
	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml	LK	PR	Jml
A									
0 – 4	13	9	22	12	7	19	25	16	41
5 – 9	10	11	21	12	12	24	22	23	45
10 – 14	15	16	31	10	10	20	25	26	51
15 – 19	13	12	25	14	14	28	27	26	53
20 – 24	12	14	26	8	8	16	20	22	42
25 – 29	6	13	19	14	13	27	20	26	46
30 – 34	11	11	22	11	6	17	22	17	39
35 – 39	8	4	12	10	7	17	18	11	29
40 – 44	5	5	10	7	8	15	12	13	25
45 – 49	3	6	9	2	4	6	5	10	15
50 – 54	5	5	10	3	3	6	8	8	16
55 – 59	6	7	13	3	5	8	21	12	23
60 – 64	0	4	4	4	2	6	4	6	10
65 – 69	4	3	7	2	1	3	6	4	10
70 – 74	3	2	5	6	0	6	9	2	11
75+	4	2	6	2	3	5	6	5	11

Sumber : Profil Desa

### 2.1.3 Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Padang Cakur merupakan masyarakat desa yang tergolong sedang berkembang. Peranan kepala desa sangat menentukan dalam memberikan keputusan termasuk masalah keamanan di desa. Desa memiliki petugas keamanan desa berjumlah 10 orang dengan sarana penunjang keamanan berupa pos ronda/ pos kamling desa.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Cakur telah menempati pada semua jenjang pendidikan. Ini dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD / MI	123	98	221
2.	SMP /MTS	35	33	68
3.	SMA /K/MA	44	48	92
4.	PT /AKADEMI	7	7	14

Tabel 2.4 Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	238	233	461
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katolik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-

Masyarakat desa memiliki kesadaran dalam mensukseskan program pemerintah. Ini terbukti dengan adanya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengikuti perlombaan dan mempersiapkan diri untuk itu. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Dalam mempergunakan hak pilih masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dimana hanya 0,3% yang tidak mempergunakan hak pilihnya.

Sarana peribadatan di desa terdapat satu buah mushalla/surau dan memiliki kepengurusannya. Untuk peningkatan sumberdaya manusia khususnya generasi muda maka untuk Musholla/ surau ini memiliki kegiatan MDA (MDA Ar-Raudhah). Kegiatan di mushalla ada berupa kegiatan Sholat berjamaah, Pengajian Umum, Pengajian Ibu-ibu, Pengajian anak-anak/MDA dan Peringatan hari besar Islam.

Untuk sarana kesehatan di desa ada Posyandu dan Poskesdes dimana terdapat tenaga medis dengan satu orang bidan. Kondisi sosial masyarakat Desa Padang Cakur dapat dilihat dari keadaan sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Fasilitas Sosial di Desa Padang Cakur**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Tempat ibadah : a. Masjid b. Mushola	- 1
2.	Sekolah : a. TK/PAUD b. Sekolah Dasar b. Sekolah Menengah Pertama c. Sekolah Menengah Atas	1 - - -
3.	Kesehatan: a. Poskesdes b. Puskesmas c. Posyandu	1 - 2
4.	Keamanan a. Poskamling	1

#### 2.1.4 Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Padang Cakur memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu kota dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Padang Cakur.

**Tabel 2.6 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
1.	Keluarga Prasejahtera	11	KK	Jumlah KK= 103 KK
2.	Keluarga Prasejahtera 1	55	KK	
3.	Keluarga Prasejahtera 2	30	KK	
4.	Keluarga Prasejahtera 3	7	KK	
5.	Keluarga Prasejahtera 3	-	KK	
<b>B.</b>	<b>Mata Pencarian</b>			
	Petani	40	Jiwa	
	Buruh tani	60	Jiwa	
	Tukangbatu/kayu	12	Jiwa	
	PNS/karyawan	17	Jiwa	
	TNI/POLRI	-	Jiwa	
	Pensiunan	1	Jiwa	
	Pedagang	10	Jiwa	
	Lainnya	11	Jiwa	

**Tabel 2.7 Subsektor pertanian tanaman pangan**

No	Status	Jumlah	Jenisnya
1	Pemilik tanah sawah	15	
2	Pemilik tanah tegalan/ lading	25	Pisang
3	Penyewa, pengarap	60	Sawah
4	Buruh tani	50	

**Tabel 2.8 Subsektor peternakan**

No	Status	Jumlah	Jenisnya
1	Jumlah pemilik ternak sapi	50	Sapi biasa dan bali
2	Jumlah pemilik ternak kambing	1	Biasa
3	Jumlah pemilik ternak ayam	40	Kampung & Potong
4	Jumlah pemilik ternak itik	2	Itik Air
5	Jumlah pemilik ternak kerbau	15	Biasa
6	Jumlah pemilik ternak kuda	-	-
7	Jumlah pemilik ternak domba	-	-
8	Jumlah buruh peternak	-	-

**Tabel 2.9 Sub sector perikanan/nelayan**

No	Status	Jumlah
1	Jumlah pemilik kapal	-
2	Jumlah pemilik sampan/ perahu	-
3	Jumlah pemilik penanam rumput laut	-
4	Jumlah pemilik kolam ikan	15
5	Jumlah pemilik tambak	-
6	Jumlah pemilik keramba/ sejenisnya	-
7	Jumlah pemilik perikanan/ nelayan	5

**Tabel 2.10 Sub sector kerajinan**

No	Status	Jumlah (orang)	Jenis usaha
1	Jumlah pemilik usaha kerajinan	-	-
2	Jumlah pemilik usaha industri rumah tangga	25	Jahit Mukena
3	Jumlah usaha industri kecil	1	Huler
4	Jumlah pemilik usaha industri kecil	20	Warung

Dibandingkan dari jumlah penduduk usia kerja sebesar 250 jiwa (table 1.11) maka besarnya usia kerja yang bekerja adalah 51%.

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Usia Kerja**

No	Angkatan kerja	Jumlah (orang)
1	Penduduk usia kerja	250
2	Penduduk usia kerja yang bekerja	150
3	Penduduk usia kerja yang tidak bekerja/pelajar	100

Karyawan yang terdiri dari pegawai negeri sipil, ABRI, Polisi dan Swasta menjadi urutan kedua banyaknya penduduk usia kerja. Pada umumnya banyak yang karyawan ke luar desa. Hanya bahagian kecil yang menjadi pekerja di desa sendiri. Ini dikarenakan banyaknya usia kerja yang memiliki usaha sendiri di Desa Padang Cakur.

## 2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, sedangkan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkatnya.

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Padang Cakur dibagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Hilir dan Dusun Tarantang

dan setiap Dusun dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun. Sedangkan posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan Kepada Masyarakat :

**Tabel 2.12 Dusun**

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Keterangan
1.	Dusun Hilir	78	-
2.	Dusun Tarantang	80	-

**Tabel 2.13 Jarak dan Waktu Tempuh Desa**

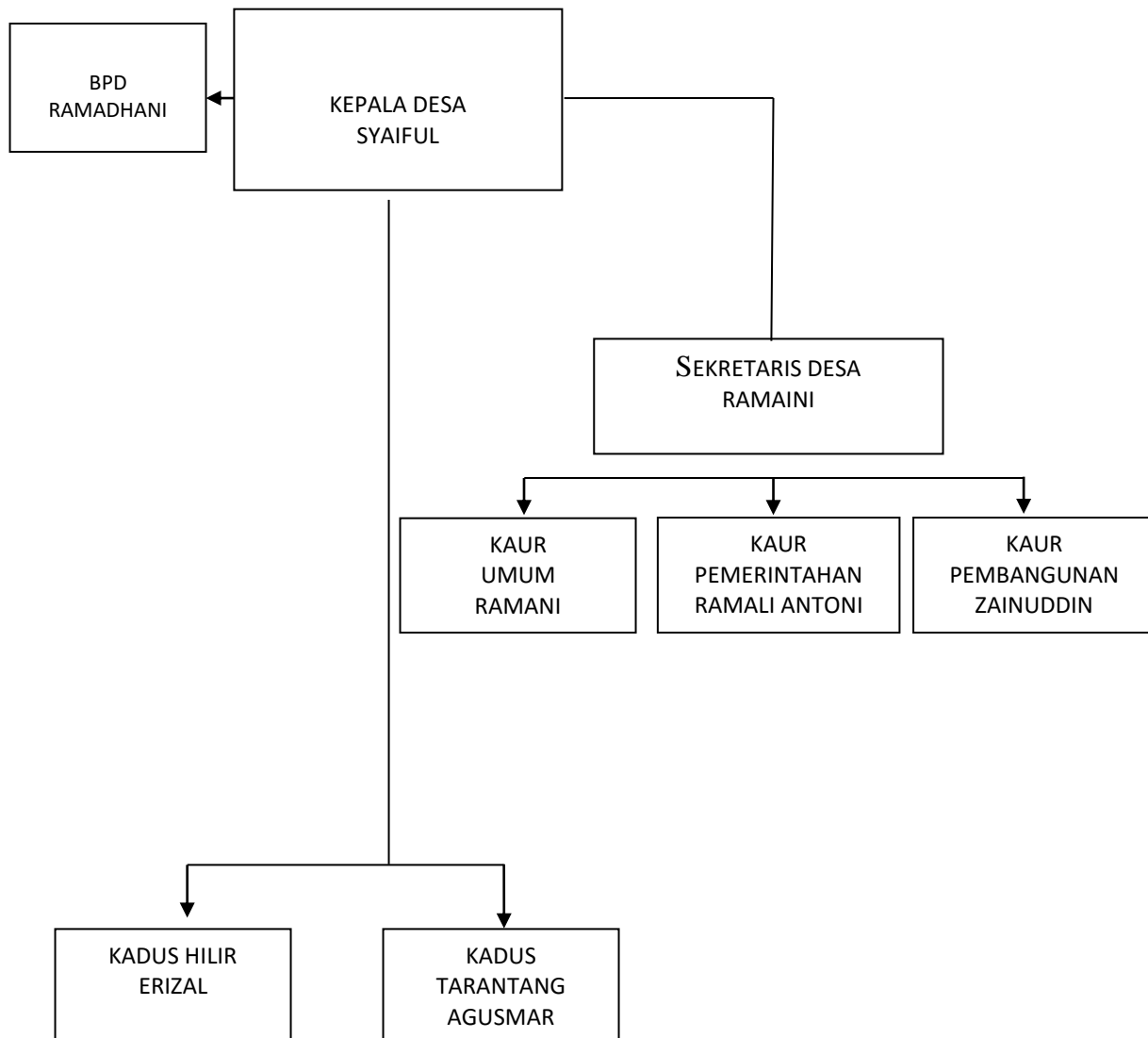
No	Orbit dan Waktu Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibu Provinsi	65 Km
2	Jarak ke Ibu Kota	3 Km
3	Jarak ke Ibu Kecamatan	3 Km
4	Waktu Tempuh ke Ibu Provinsi	1 Jam 30 Menit
5	Waktu Tempuh ke Ibu Kota	10 menit
6	Waktu tempuh ke Ibu Kecamatan	10 Menit

Alat angkutan yang melewati Desa Padang Cakur terdiri dari Ojek yang selalu ada setiap waktu.

### 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Cakur

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya. Perangkat Desa terdiri dari satu orang Sekretaris Desa , 3 orang Kaur dan 2 rang kepala dusun.

#### Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



Adapun tugas pokok dan fungsi dan masing-masing urusan terinci sebagai berikut:

#### Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Umum:

1. Pelaksanaan administrasi desa.
2. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan
4. Pengelolaan keuangan desa
5. Penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah desa
6. Penyusun rencana penggunaan uang
7. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan desa

8. Pelaksanaan pengelolaan barang-barang inventaris dan kekayaan desa
9. Pelaksanaan pemeliharaan inventaris desa
10. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan Kepala Desa.

**Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Pemerintahan:**

1. Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah
2. Pelaksanaan tugas-tugas keagrarian sesuai dengan wewenangnya.
3. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi: meninggal, lahir, datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban dan menginventaris potensi masyarakat dalam rangka memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban.
5. Pelaksanaan segala urusan dalam rangka membina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,
6. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga
7. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
8. Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti PBB dan pajak serta retribusi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
9. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk dan kebijakan Kepala Desa.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan:**

1. Pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.
2. Pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomian dan distribusi
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti koperasi, usaha kecil, industri kecil, industri rumah tangga, dan lain-lain jenis kegiatan perekonomian. Dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan
5. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
6. Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di desa
7. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa
8. Penyusunan rancangan strategis pengembangan sarana dan prasarana perekonomian
9. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana pemecahannya.

10. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.
11. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

**BAB III**  
**POTENSI DAN MASALAH**

**3.1 Potensi**

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Padang Cakur terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 : Tabel Potensi Desa Padang Cakur

No	Bidang	Potensi
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Gedung PAUD/TK</li> <li>2. Adanya guru PAUD, MDA dan TPQ</li> </ol>
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Poliklinik Desa (Puskesmas/Polindes)</li> <li>2. Adanya Bidan Desa</li> <li>3. Adanya Sumber Air Bersih</li> <li>4. Adanya Kegiatan Posyandu</li> </ol>
3.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Jalan Lingkung</li> <li>2. Adanya jalan usaha tani</li> <li>3. Toko Bangunan Relatif Dekat</li> <li>4. Kesadaran Masyarakat Gotong royong cukup baik</li> </ol>
4.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan desa</li> <li>2. Adanya lahan tanah desa</li> <li>3. Adanya SDM untuk pengembangan kebun bibit desa</li> </ol>
5.	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya mushalla</li> <li>2. Adanya pos keamanan lingkungan</li> <li>3. Adanya lap. Bola volly, badminton dan sepak bola</li> <li>4. Adanya kegiatan karang taruna</li> <li>5. Adanya kelompok rebana/yasinan</li> <li>6. Adanya pengajian rutin bulanan</li> <li>7. Adanya kegiatan PKK</li> <li>8. Adanya Tempat pemakaman umum</li> <li>9. Adanyanya TPQ dan MDA</li> </ol>
6.	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok KMN aktif dan lancar</li> <li>2. Adanya KUBE FM</li> <li>3. Adanya kelompok pembudidaya IKan</li> <li>4. Adanya usaha ayam potong / ras</li> <li>5. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak</li> </ol>



		6. Adanya usaha menjahit pakaian 7. Adanya usaha pembibitan tanaman 8. Adanya usaha bengkel motor 9. Adanya usaha keripik pisang dan keripik ubi 10. Adanya industri kecil pabrik kerupuk
7.	Pemerintahan	1. Struktur Pemerintah Desa Lengkap 2. Struktur BPD lengkap 3. Sarana kantor desa cukup memadai 4. Adanya kendaraan dinas roda dua
8.	Pertanian	1. Banyaknya kolam budidaya ikan 2. Adanya pembudidaya ikan 3. Adanya lahan pesawahan dan palawija
9.	Pariwisata	1. Adanya lapangan yang bisa digunakan area hiburan umum 2. Adanya tempat pemancingan Kolam

### 3.2 Masalah

Berdasarkan pengkajian keadaan desa, masalah yang terdapat di Desa Padang Cakur tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 : Daftar Masalah Desa Padang Cakur

No	Bidang	Potensi
1.	Pendidikan	1. Masih adanya anak putus sekolah pendidikan dasar 2. Tidak tersedia perpustakaan desa 3. Tidak adanya honor guru PAUD / TK dan MDA 4. Ruang belajar gedung TK/PAUD kurang memadai
2.	Kesehatan	1. Adanya masyarakat yang tidak memiliki MC 2. Program BPJS Kesehatan belum merata di masyarakat 3. Belum dikembangkannya TOGA 4. Kurangnya pelayanan kesehatan bagi lansia 5. Kurangnya tenaga medis di polindes
3.	Sarana dan Prasarana	1. Jalan lingkungan sulit dilalui pada waktu hujan 2. Tidak tersedianya jaringan telpon / speedy / internet
4.	Linkungan Hidup	1. Adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase. 2. Adanya genangan air di tepi dan badan jalan ketika hujan
5.	Sosial Budaya	1. Generasi muda kurang partisipatif dalam musyawarah desa

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni</li> <li>3. Acara keagamaan kurang diminati oleh pemuda / pemudi</li> <li>4. Terkadang terjadi tindakan kejahatan pencurian</li> </ol>
6.	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah pinjaman untuk kelompok KMN</li> <li>2. Kurangnya pembinaan terhadap POKDAKAN</li> <li>3. Pembudidaya ikan masih ketergantungan modal dengan pengusaha ikan</li> <li>4. Adanya usaha masyarakat tidak memiliki ijin usaha</li> </ol>
7.	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja perangkat desa dan BPD belum memadai</li> <li>2. Administrasi desa belum tertata dengan baik</li> <li>3. Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer oleh perangkat desa</li> <li>4. Ada masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga</li> <li>5. Ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP</li> <li>6. Sarana kantor desa masih kurang memadai / darurat</li> </ol>
8.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pupuk bersubsidi sulit diperoleh</li> <li>2. Harga hasil pertanian yang rendah</li> <li>3. Masih adanya lahan pertanian yang tidak digarap (lahan tidur)</li> <li>4. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan</li> </ol>
9.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedianya tempat penyelenggaraan hiburan umum</li> </ol>

## BAB IV

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### 4.1 VISI DAN MISI

##### 4.1.1 Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Padang Cakur dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Padang Cakur tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN INTELEKTUAL  
MELALUI PENINGKATAN USAHA PERTANIAN

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

- ✚ Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Padang Cakur yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.
- ✚ Religius, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Padang Cakur yang memiliki akhlak mulia dengan meletakkan pondasi agama sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.
- ✚ Intelektual, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berbudi pekerti yang luhur.
- ✚ Pengembangan Potensi Usaha Pertanian, yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan di bidang usaha Pertanian sebagai potensi unggulan desa.

##### 4.1.2 Misi

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Religius dan Intelektual melalui Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya tersebut diatas, Desa Padang Cakur telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia
4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan
5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil Pertanian dan perikanan budidaya
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

#### 4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

##### 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Padang Cakur yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2014–2019 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Padang Cakur tahun 2015-2019

didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Padang Cakur berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

**1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal**

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan perkebunan
- b. Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi Pertanian, peternakan dan perkebunan
- c. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan

**2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum**

- a. Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif
- c. Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur.

**3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia**

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama
- b. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa
- d. Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga

**4. Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan**

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
- b. Mengusahakan Mendirikan SD dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar
- c. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal

**5. Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Perikanan Budidaya**

- a. Pengembangan dan penguatan Kelompok Tani dan Perikanan
- b. Pembangunan sarana prasarana penunjang pertanian dan Perikanan

**6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
- e. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa

- f. Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik

#### 4.2.2 Potensi dan masalah

Dalam menentukan rumusan arah kebijakan pembangunan desa terdapat potensi dan masalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Potensi dan Masalah Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	Potensi	Masalah
<b>Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal</b>			
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	Hasil pertanian, peternakan dan perkebunan cukup memadai	Harga hasil pertanian , peternakan dan perkebunan tidak relevan
2	Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	Lahan pertanian, peternakan dan perkebunan yang baik, kelompok tani dan Poktan	Kurangnya permodalan, minimnya akses pemasaran, harga hasil produksi rendah
3	Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan	Besarnya dukungan pemerintah daerah, lahan, pertanian, peternakan dan perkebunan yang baik, kelompok tani dan Poktan	Dibutuhkan biaya tinggi, kurangnya pembinaan pemanfaat, tidak merata pembangunan
<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum</b>			
1	Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif.	Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya Kegiatan	Titik pembangunan yang cukup banyak, terbatasnya pendanaan dan bantuan dari pemerintah
2	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya Kegiatan	Kesadaran masyarakat Rendah
3	Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur	Adanya hasil pembangunan, adanya tenaga profesional	Tata kelola yang belum maksimal
<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia</b>			
1	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama	Adanya kegiatan pengajian bulanan desa, adanya forum Imam Khotib, adanya tempat kegiatan keagamaan	Kurang / tidak adanya insentif pengelola, adanya pengaruh budaya tidak baik
2	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	Adanya tokoh-tokoh agama, adanya kegiatan	Pembinaan dan perhatian dari pemerintah kurang
3	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa	Adanya pemuda / pemudi berkualitas, adanya kegiatan pembangunan	Kurangnya kepedulian masyarakat
4	Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga	Adanya kesenian budaya, adanya kegiatan olahraga, adanya minat dan bakat	Kurangnya sarana penunjang
<b>Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan</b>			
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	Adanya gedung Sekolah PAUD, adanya tenaga pengajar, adanya taman	Tempat belajar siswa kurang, masih kurangnya sarana penunjang dan

		bacaan bagi anak usia dini	insentif guru PAUD, serta sarana bermain anak di PAUD
2	Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	Belum Adanya gedung SD, Tidak adanya tenaga pengajar	SD Belum ada
3	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal	Adanya taman bacaan, adanya para lulusan pendidikan tinggi yang belum memiliki pekerjaan mengikat untuk menjadi tenaga pengajar non formal	Kurangnya sarana penunjang
<b>Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Pertanian dan Peternakan</b>			
1	Pengembangan dan penguatan Kelompok Pertanian dan ternak	Adanya Kelompok, adanya SDM berkualitas	Kurangnya permodalan Poktan, kurangnya tata kelola administrasi Poktan, Manajemen kelompok kurang baik
2	Pembangunan sarana prasarana penunjang pertanian dan peternakan	Adanya lahan pertanian dan peternakan	Pengelolaan pertanian kurang optimal, terbatasnya pendanaan dan bantuan dari pemerintah
<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
1	Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	Adanya peraturan pemerintah tentang larangan memancing di sekitar wilayah kolam perikanan	Membutuhkan biaya tinggi, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih kurang
2	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa	Perangkat desa lengkap	Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya insentif perangkat desa, minimnya pendapatan desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer
3	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Perangkat desa lengkap, adanya buku kas dan keuangan desa	Tata kelola yang belum maksimal, kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer
4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Adanya masyarakat dengan SDM berkualitas	Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya insentif perangkat desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer
5	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Belum diberlakukannya jam kerja perangkat desa
6	Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Tidak tersedianya jaringan internet / speedy, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer

### **4.2.3 Program Pembangunan Desa**

Program pembangunan Desa Padang Cakur dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut :

#### **1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal**

- a. Program pengembangan sumberdaya Pertanian, peternakan dan Perkebunan
- b. Program pengembangan kelompok tani
- c. Program pengembangan usaha peternakan
- d. Program pengembangan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan

#### **2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum**

- a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan
- c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat
- d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi produktif

#### **3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia**

- a. Program pengembangan pendidikan religius
- b. Program pengembangan lembaga dan kelompok pengajian
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana musholla dan TPQ, MDA
- d. Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola musholla dan TPQ, MDA

#### **4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan**

- a. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal dan Nonformal
- b. Program pembangunan dan penguasaan teknologi informasi

#### **5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil Pertanian**

- a. Program pembangunan sarana penunjang produksi Pertanian
- b. Program pengembangan modal dan investasi Pertanian
- c. Program fasilitasi pengadaan benih, bibit serta pakan dan bibit unggul
- d. Pengembangan inovasi produk olahan perikanan
- e. Program fasilitasi Kelompok Pembudidaya Ikan dalam pengembangan organisasi
- f. Program fasilitasi stabilisasi harga hasil perikanan budidaya

## 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa
- b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa
- c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- d. Program peningkatan kualitas aset desa
- e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa
- f. Program peningkatan perencanaan pembangunan
- g. Program peningkatan pengawasan
- h. Program peningkatan siskamling
- i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan

### 2.1.1. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai misi yang dirumuskan, maka disusun strategi pencapaian sebagai langkah teknis dan sistematis sebagai dasar penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Strategi Pencapaian Pembangunan Desa

No	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	Strategi Pencapaian
<b>Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal</b>		
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan kelompok tani dan poktan</li> <li>▪ Pemberian bantuan modal</li> <li>▪ Penggunaan teknologi tepat guna</li> </ul>
2	Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan kelompok tani dan poktan</li> <li>▪ Pemberian bantuan modal</li> <li>▪ Pengembangan media promosi dan informasi</li> </ul>
3	Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan teknologi tepat guna</li> <li>▪ Pembinaan kelompok tani dan poktan</li> </ul>
<b>Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum</b>		
1	Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel</li> <li>▪ Fasilitasi pengadaan bantuan pembangunan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga</li> <li>▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian</li> </ul>
2	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sistematis</li> <li>▪ Pembentukan tim kerja khusus</li> <li>▪ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan tahunan</li> <li>▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian</li> </ul>
3	Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan administrasi dan dokumen pembangunan desa</li> <li>▪ Integrasi perencanaan pembangunan desa</li> <li>▪ Pemantauan berkala</li> </ul>
<b>Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia</b>		
1	Peningkatan kualitas pemahaman dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intensifikasi kegiatan pengajian rutin</li> </ul>



	pengamalan agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bulanan desa</li> <li>▪ Pembinaan lembaga / organisasi keagamaan oleh pihak terkait</li> </ul>
2	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas pengajian rutin bulanan desa</li> <li>▪ Pengembangan lembaga forum imam khotib</li> </ul>
3	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas KPM dan KTD</li> <li>▪ Peningkatan pola fasilitasi perencanaan pembangunan desa</li> <li>▪ Intensifikasi pola pengambilan keputusan dalam musyawarah desa</li> </ul>
4	Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intensifikasi kegiatan kesenian</li> <li>▪ Intensifikasi kegiatan olahraga</li> <li>▪ Pengembangan bakat dan minat</li> </ul>
<b>Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan</b>		
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini</li> <li>▪ Pengembangan akses dan mutu pendidik</li> </ul>
2	Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan sarana prasarana akses ke sekolah dasar</li> <li>▪ Kampanye pemberantasan buta pendidikan dasar</li> </ul>
3	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan MDA dan TPQ</li> <li>▪ Pengadaan fasilitas pendidikan non formal</li> </ul>
<b>Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Pertanian dan peternakan</b>		
1	Pengembangan dan penguatan Kelompok Tani dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota</li> <li>▪ Pengadaan sarana penunjang kegiatan</li> </ul>
2	Pembangunan sarana prasarana penunjang pertanian dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan pembangunan sarana penunjang kegiatan Pertanian dan Peternakan</li> <li>▪ Pengadaan sarana penunjang kegiatan Pertanian dan Peternakan</li> </ul>
<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
1	Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SDM perangkat desa</li> <li>▪ Perencanaan pembangunan desa</li> </ul>
2	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SDM perangkat desa</li> <li>▪ Peningkatan insentif perangkat desa</li> </ul>
3	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan tata kelola administrasi desa</li> <li>▪ Pengembangan penggunaan aplikasi komputer</li> </ul>
4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SDM perangkat desa</li> <li>▪ Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik</li> </ul>
5	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian dan penyusunan SOP perangkat desa</li> <li>▪ Pengembangan penggunaan aplikasi komputer</li> </ul>
6	Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan SDM perangkat desa</li> <li>▪ Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik</li> </ul>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi desa, potensi dan masalah, serta daftar RPJMDes 2014-2019, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak potensi dan masalah untuk mencapai visi misi desa
2. Dibutuhkannya perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan pembangunan desa.
3. Diperlukannya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa.
4. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.
5. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. RPJMDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui di desa, maka kepada seluruh pihak terkait agar menjadikan RPJMDes ini menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.
2. RPJMDes ini agar disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pihak lain untuk menjaga transparansi, arah kebijakan serta prinsip partisipatif.
3. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMDes ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi pembangunan desa.
4. Diharapkan proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
5. Mengingat banyaknya uraian RPJMDes, maka diharapkan seluruhnya dapat teranggarkan secara proporsional.
6. Perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak dalam peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan pembangunan desa
7. Perlunya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa.



## 1. SKETSA DESA PADANG CAKUR



2. TABEL POTENSI DAN MASALAH DARI PENGKAJIAN KEADAAN DESA DAN DUSUN

No	Masalah	Potensi
<b>PENDIDIKAN</b>		
01	Masih adanya anak putus sekolah pendidikan dasar	- Tenaga
02	Ruang belajar PAUD yang tidak memadai	- Swadaya - Tenaga
03	Minimnya honor guru PAUD dan MDA	- Swadaya - Tenaga
04	Tidak adanya gedung sekolah: SD, SMP, MTs, SMA dan SMK	- Swadaya - Lahan
<b>KESEHATAN</b>		
01	Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki WC	- Swadaya - Lahan
02	Program BPJS kesehatan belum merata di masyarakat	- Swadaya - Tenaga
03	Belum dikembangkannya TOGA	- Swadaya - Lahan
04	Kurangnya pelayanan kesehatan bagi lansia	- Swadaya - Tenaga
05	Kurangnya tenaga medis di pustu	- Swadaya - Tenaga
06	Fasilitas air bersih belum mencukupi	- Swadaya - Tenaga
07	Belum adanya klinik/dokter praktek	- Swadaya - Tenaga
<b>SARANA dan PRASARANA</b>		
01	Drainase jalan poros dan jalan linkung tidak memadai	- Swadaya - Lahan
03	Belum adanya fasilitas jaringan internet	- Swadaya - Lahan
04	Belum adanya bak sampah	- Swadaya - Lahan
05	Gedung MDA belum permanen	- Swadaya - Lahan
06	Sarana MDA belum memadai	- Swadaya - Tenaga

07	Belum adanya jaringan irigasi	- Swadaya - Tenaga
08	Jalan Lingkar	- Swadaya - Tenaga
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
01	Tidak termanfaatkannya lahan tidur	- Swadaya - Lahan
02	Adanya wilayah mangrove	- Swadaya - Lahan
03	Adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase	- Swadaya - Lahan
04	Adanya genangan air di tepi jalan dan badan jalan ketika hujan	- Swadaya - Lahan
05	Tidak termanfaatkannya kolam ikan	- Swadaya - Lahan
	<b>SOSIAL BUDAYA</b>	
01	Generasi muda kurang berpartisipasi dalam musyawarah desa	- Swadaya - Lahan
02	Adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni	- Swadaya - Lahan
03	Acara keagamaan kurang diminati oleh pemuda/pemudi	- Swadaya - Lahan
04	Terkadang terjadi tindakan kejahatan pencurian	- Swadaya - Lahan
	<b>KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT</b>	
01	Tidak lancar dan kurangnya pembinaan UP2K, PNPM, KMN, dan LKM-A	- Swadaya - Lahan
02	Adanya usaha masyarakat tidak memiliki ijin usaha	- Swadaya - Lahan - Tenaga
03	Kurangnya bantuan modal usaha	- Swadaya - Lahan - Tenaga
	<b>PEMERINTAH</b>	
01	Batas desa (kota) dengan kabupaten yang bermasalah / belum jelas	- Swadaya - Lahan
02	Administrasi desa belum tertata dengan baik	- Swadaya - Lahan

03	Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer oleh perangkat desa	- Swadaya - Tenaga
04	Adanya masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga dan e-KTP	- Swadaya - Tenaga
05	Sarana kantor desa masih kurang memadai / darurat	- Swadaya - Tenaga
06	Kurangnya tunjangan perangkat desa dan BPD	- Swadaya - Tenaga
	<b>PERTANIAN</b>	
01	Pupuk bersubsidi sulit diperoleh	- Swadaya - Tenaga
02	Harga hasil pertanian yang rendah	- Swadaya - Tenaga
03	Masih adanya lahan pertanian yang tidak digarap (lahan tidur)	- Swadaya - Lahan
04	Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan	- Swadaya - Lahan
05	Pemasaran hasil tani yang tidak lancer	- Swadaya - Tenaga
06	Jalan Usaha Tani	- Swadaya - Tenaga





**KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN**

**DESA : PADANG CAKUR**  
**KECAMATAN : PARIAMAN SELATAN**  
**KOTA : PARIAMAN**

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4
01	Pembina kelompok tani GAPOKTAN (KWT SEROJA, KT SAKATO DAN KT. SERUMPUN CAKUA)	Kepala Desa	Pemerintah
02	Pembinaan P2K	Ketua PKK	Pemerintah
03	Pembinaan KMN	Kepala Desa	
	PembinaYANDU	Kepala Desa	Swadaya dan Pemerintah
	Pembina LIMNAS	Kepala Desa	Swadaya dan Pemerintah
	Pembangunan Musholla	Kepala Desa	Swadaya dan Pemerintah



### Penentuan Peringkat Masalah

No	Masalah	Dirasakan oleh Orang banyak	Sangat parah	Menghambat peningkatan	Sering terjadi	Tersedia Potensi Untuk memecahkan Masalah	Jumlah nilai	Urutan peringkat
	<b>PENDIDIKAN</b>							
01	Masih adanya anak putus sekolah pendidikan dasar	1	1	2	1	2	7	5
03	Ruang belajar PAUD yang tidak memadai	2	2	2	1	2	9	4
04	Minimnya honor guru PAUD dan MDA	2	2	2	1	3	10	2
05	Tidak adanya gedung sekolah: SD,SMP, MTs, SMA dan SMK	1	1	1	1	1	5	6
06	Tidak adanya pagar luar PAUD	3	4	2	1	2	12	1
	<b>KESEHATAN</b>							
01	Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki WC	2	2	1	1	2	8	5
02	Program BPJS kesehatan belum merata di masyarakat	4	4	3	1	3	15	1
03	Belum dikembangkannya TOGA	2	1	1	1	1	6	6
04	Kurangnya pelayanan kesehatan bagi lansia	2	1	1	1	1	6	7
05	Kurangnya tenaga medis di pustu	3	3	3	1	3	13	3
06	Fasilitas air bersih belum mencukupi	3	3	2	1	2	11	4
07	Belum adanya klinik/dokter praktek	4	4	2	1	3	14	2
	<b>SARANA dan PRASARANA</b>							
01	Drainase jalan poros dan jalan linkung tidak memadai	3	3	3	1	3	13	4
03	Belum adanya fasilitas jaringan internet	1	1	1	1	1	5	6



04	Belum adanya bak sampah	4	4	2	2	2	14	2
05	Gedung MDA belum permanen	2	2	1	1	2	8	5
06	Sarana MDA belum memadai	4	4	3	1	4	16	1
07	Belum adanya jaringan irigasi	4	4	3	1	4	16	3
08	Jalan Lingkar	1	1	1	1	1	5	7
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>							
01	Tidak termanfaatkannya lahan tidur	4	3	4	1	3	15	1
02	Adanya wilayah mangrove	2	2	1	1	2	8	4
03	Adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase	1	1	1	1	1	5	5
04	Adanya genangan air di tepi jalan dan badan jalan ketika hujan	2	1	1	2	2	8	3
05	Tidak termanfaatkannya kolam ikan	2	2	2	1	2	9	2
	<b>SOSIAL BUDAYA</b>							
01	Generasi muda kurang berpartisipasi dalam musyawarah desa	4	4	3	1	3	15	1
02	Adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni	1	1	1	1	2	6	3
03	Acara keagamaan kurang diminati oleh pemuda/pemudi	1	1	1	1	2	6	4
04	Terkadang terjadi tindakan kejahatan pencurian	2	3	1	1	3	10	2
	<b>KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT</b>							
01	Tidak lancar dan kurangnya pembinaan UP2K, PNPM, KMN dan LKM-A	4	3	2	1	3	13	2



02	Adanya usaha masyarakat tidak memiliki ijin usaha	3	2	2	2	3	12	3
03	Kurangnya bantuan modal usaha	4	3	4	1	4	16	1
<b>PEMERINTAH</b>								
01	Batas desa (kota) dengan kabupaten yang bermasalah / belum jelas	2	2	1	1	2	8	4
02	Administrasi desa belum tertata dengan baik	1	1	1	1	1	5	5
03	Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer oleh perangkat desa	2	2	2	1	2	9	3
04	Adanya masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga dan e-KTP	1	1	1	1	1	5	6
05	Sarana kantor desa masih kurang memadai / darurat	5	4	3	1	4	17	1
06	Kurangnya tunjangan perangkat desa dan BPD	3	3	4	1	2	13	2
<b>PERTANIAN</b>								
01	Pupuk bersubsidi sulit diperoleh	4	3	4	1	3	15	1
02	Harga hasil pertanian yang rendah	4	3	3	1	3	14	2
03	Masih adanya lahan pertanian yang tidak digarap (lahan tidur)	3	3	3	1	2	12	3
04	Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan	2	2	2	1	2	9	4
05	Pemasaran hasil tani yang tidak lancer	3	2	2	1	2	8	5
06	Jalan Usaha Tani	3	2	2	1	2	8	6



### RENCANA KEGIATAN DI DESA PADANG CAKUR TAHUN 2014-2019

No	Jenis kegiatan	Kriteriadan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan pendapatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SARANA PRASARANA FISIK						
	1. Gedung PAUD	5	5	6	1	17	13
	2. Gedung sekolah SMP dan SMA sederajat	5	5	7	1	18	11
	3. Pagar luar gedung SD	7	7	6	1	21	2
	4. Fasilitas air minum	8	7	7	3	25	1
	5. Drainase	6	6	6	1	19	5
	6. Pembuatan Jalan lingkung	7	6	6	1	20	4
	7. Bak sampah	8	5	6	1	20	3
	8. Fasilitas internet	4	5	6	1	16	15
	9. Mobiler MDA	5	5	4	1	15	16
	10. Batas desa (kota) dengan Kabupaten	6	5	6	1	18	8
	11. Mobiler desa	5	5	6	1	17	14
	12. Pembuatan Talut sungai sikijang	6	6	6	1	19	7
	13. Pembukaan lahan tidur	5	6	6	1	18	9
	14. Perbaikan irigasi (pengairan sawah)	5	6	6	1	18	10
	15. Pemasangan batu grid di pantai belibis	6	6	6	1	19	6
	16. Pembuatan pagar lapangan sholat	5	6	5	1	17	12
	17. Pembuatan kantor desa	4	5	4	1	14	17
	18. Sepeda kepala dusun	4	4	5	1	14	18



No	Jenis kegiatan	Kriteriadan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan pendapatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN,						
	1. Pengadaan pupuk bersubsidi	5	5	6	1	17	3
	2. Pengadaan benih ikan	5	5	5	1	16	4
	3. Pengadaan bibit padi dan palawija	5	5	5	1	16	5
	4. Pengadaan obat dan pakan ternak	5	5	4	1	15	10
	5. Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan peternakan	5	6	5	2	18	2
	6. Pembuatan MOU pemasaran	5	5	5	1	16	6
	7. Pembinaan GAPOKTAN	5	5	4	1	15	7
	8. Kolamisasi	5	5	4	1	15	9
	9. Konservasi PSDA	5	5	4	1	15	8



No	Jenis kegiatan	Kriteriadan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
III	KESEHATAN						
	1. Jambanisasi	6	6	5	2	19	5
	2. Jaminan kesehatan (BPJS)	8	8	9	4	29	1
	3. PIPANISASI / PAM isasi	7	7	8	3	25	2
	4. Perawatan sarana airbersih	7	7	7	2	23	3
	5. Pengolahan limbah organik	5	4	5	1	15	9
	6. Peralatan YANDU dan BUMIL	6	6	5	1	18	7
	7. Pembuatan MCK	6	6	6	3	21	4
	8. Jaminan kesehatan aparat pemerintah	4	4	4	1	13	10
	9. Pembinaan kader kesehatan	5	5	5	1	16	8
	10. Pembinaan masyarakat penanaman TOGA (Tanaman Obat Keluarga)	6	6	5	2	19	6



No	Jenis kegiatan	Kriteria dan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan pendapatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	EKONOMI						
	1. Pembinaan keuangan lembaga di desa	7	6	7	1	21	3
	2. Peningkatan modal usaha	7	6	7	2	22	2
	3. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa	7	5	6	1	19	4
	4. Pelatihan keterampilan, pertukangan, bengkel, souvenir, kuliner halal dan sehat.	8	8	8	3	27	1
	5. Pemberdayaan POKMASWAS	6	5	5	1	17	5





No	Jenis kegiatan	Kriteriadan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
V	PEMERINTAH						
	1. Pembinaan LIMNAS	6	5	5	1	17	4
	2. Peningkatan tunjangan aparat desa	5	5	5	1	16	6
	3. Penetapan dan Penegasan batas desa	7	5	4	1	17	3
	4. Pembinaan Administrasi Dusun	6	5	4	1	16	7
	5. Pembinaan Kamling	6	5	5	1	17	5
	6. Pembinaan kinerja aparat Desa, LPM, Karang Taruna dan P3NTR	7	6	6	1	20	1
	7. Pendataan dan Pengelolaan informasi desa	5	4	5	1	15	8
	8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	7	6	6	1	20	2



NO	Jenis kegiatan	Kriteriadan nilai pembobotan				Jumlah nilai	Urutan peningkatan
		Dirasakan oleh banyak orang	Dukungan potensi	Dukungan terhadap peningkatan pendapatan	Dukungan swadaya		
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN						
	1.Pembinaan dan pelestarian adat	7	6	6	1	20	1
	2.Bantuan yatim piatu	6	4	5	1	16	6
	3.Bantuan Rumah Tak layak huni	4	4	4	1	13	9
	4.Bantuan Fakirmiskin dan lansia	5	5	5	1	16	7
	5.Pelestarian BudayaTradisional	6	5	5	1	17	4
	6.Rehap Masjid dan Mushola	7	6	5	1	19	2
	7.Pembinaan Takmir Masjid	6	5	4	1	16	5
	8.Pembangunan Gapura Desa Wisata	3	4	3	1	11	11
	9. Pembuatan sanggar seni islami	4	4	3	1	12	10
	10.Pembinaan labai dan rubiah	6	5	5	1	17	3
	11.Peningkatan honor guru MDA	5	4	4	1	14	89

